

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Atmadja, I dewa gede. (2012). *Hukum Konstitusi problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar – dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatmawati. (2004). *Hak menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, (2008). *UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lonto, L.A. & Lolong, J.R.W., Fils.P.T. (2016). *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak.
- Marwan, Ali. (2017). *Konsep judicial review dan pelembagaannya di berbagai negara*. Malang: Setara Press
- MD, Mahfud. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: katalog dalam terbitan (KDT)
- Mertokusumo, Sudikno, (2007). *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nasution, Johan Bahder, (2011). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: Mandiri maju.

- Novendri., m. Nggilu., Fence m. Wantu. & Ahmad. (2020). *Hukum konstitusi, menyongsong fajar perubahan konstitusi Indonesia melalui pelibatan mahkamah konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, H.M. Agus. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Serlika, A. & Rio, A. (2020). *Filsafat hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subardjo. (2012). *Kedaulatan dan sistem perwakilan di dalam negara*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Sulaiman, F.K. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Witanto, W.Y & Kutawaringin, N.P.A. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara pidana*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Abdul Rahman Maulana Siregar. (2017). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945*. Fh Unpab Vol. 5 No. 5, oktober 2017.
- Achmad Edi Subiyanto. (2020). *Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaruan demokrasi Indonesia*. Jurnal konstitusi, Volume 17, Nomor 2, juni 2020.
- Donal Fariz. (2020). *Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah*. Jurnal konstitusi , volume 17, Nomor 12, juni 2020.

- Hardiyanto, Shalahudin, Ahmad. (2017). *Hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (analisis terhadap putusan Mk.No. 42/PUU-XIII/2015)*. Mimbar yustitia vol. 1 no. 2 desember 2017.
- Imam, Sujono. (2021). *Urgensi penemuan hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam kewenangan mahkamah konstitusi*. Jurnal konstitusi, volume 18, Nomor 3, September 2021.
- Indra Wijacsono, Rahmat Muhajir Nugroho. (2021). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 01, Issue 0, 2021.
- Ja'far Baehaqi. (2013). *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Janedjri M. Gaffar. (2013). *Peran putusan mahkamah konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggara pemilu*. Jurnal konstitusi, volume 10, nomor 1, maret 2013.
- Khairul Fahmi. (2017). *Pergeseran Pembatasan Hak pilih dalam regulasi pemilu dan pilkada*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, desember 2017.
- Muh. Sabaruddin sinapoy, Safril Sofwan Sanib. (2019). *Pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilu: suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia*.
- Rahmat Muhajir Nugroho. (2016). *Urgensi pengaturan perkara constitutional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal ilmu hukum Novelty. Volume. 7 No. 1 Februari 2016.
- Yusron Munawir. (2019). *Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum 2019 di Indonesia*. Media of law and sharia, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.
- Zainal Arifin Mochar. (2015). *Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Hasanuddin Law Review, Volume 3, Desember (2015)

ARTIKEL PROSIDING

Zainal Arifin Mochtar : 18 Juni 2019 03:30 WIB. Kompas.id “Asa Demokrasi di Palu Hakim” selengkapnya <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/18/asa-demokrasi-di-palu-hakim>. Diakses pada 10 Februari 2021, 12:00 WIB.

Pilipus F. Sarumaha : Bawaslu Selasa, 07 Januari 2022. “Problematika Pencalonan Anggota Legislative Mantan Terpidana” selengkapnya <https://niasselatan.bawaslu.go.id/problematika-pencalonan-anggota-legislative-mantan-terpidana/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sejarah dan Perkembangan Kamis 13 Agustus 2015, 08:52 WIB. Selengkapnya <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>. Diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 23:13 WIB.

Liputan 6 : Nama-Nama 49 Caleg Mantan Koruptor yang maju di Pemilu 2019 : 30 Januari 2019, 23:10 WIB. Selengkapnya <https://www.liputan6.com/pileg/read/3883847/nama-nama-49-caleg-mantan-koruptor-yang-maju-di-pemilu-2019>. Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 15:23 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019